SKRIPSI

KOORDINASI ANTARA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BATU MAS KECAMATAN NANGA TAYAP KABUPATEN KETAPANG

Oleh:

Margareta Amadia Liana
NIM. E1032221027

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Jurusan Ilmu Administrasi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2026

SKRIPSI

KOORDINASI PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BATU MAS KECAMATAN NANGA TAYAP KABUPATEN KETAPANG

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Margareta Amadia Liana

NIM.E1032221027

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

LEMBAR PENGESAHAN

KOORDINASI PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BATU MAS KECAMATAN NANGA TAYAP KABUPATEN KETAPANG

Oleh :
Margareta Amadia Liana
NIM E1032221027

Dipertahankan di	:	Pontianak
Pada Hari/Tanggal	:	Rabu, 16 Juli 2026.
Waktu	:	13:00 WIB - Selesai
Tempat	:	Ruang Sidang 3

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Hj. Sri Maryuni, M.Si.	Rasidar, SE. M.Si
NIP.196503021990022001	NIP.196808252007012001
Penguji Utama	Penguji Pendamping
Dr. Ir. Hj. Ida Rochmawati, M.Si	Drs. Sugino, M.Si
NIP. 196905021998022001	NIP. 196609041995121001

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) di Desa Batu Mas, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD dalam proses perencanaan pembangunan desa. Analisis penelitian menggunakan teori koordinasi Handayaningrat yang terdiri dari indikator komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen, insentif koordinasi, dan kontinuitas perencanaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian terdiri dari Sekretaris Desa, BPD, dan Ketua RT yang dipilih secara purposive.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan MusrenbangDes telah terlaksana, namun belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh komunikasi yang masih bersifat formal dan situasional, kesadaran koordinasi yang belum diwujudkan dalam tindakan secara berkelanjutan, kompetensi partisipan yang masih perlu ditingkatkan, serta adanya perbedaan persepsi mengenai penentuan prioritas pembangunan yang berdampak pada belum optimalnya kontinuitas perencanaan desa. Penelitian ini menyarankan peningkatan komunikasi dan koordinasi secara rutin, penguatan peran BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, peningkatan keterbukaan informasi mengenai penetapan prioritas pembangunan, serta peningkatan kapasitas aparatur desa dan anggota BPD melalui pelatihan dan pembinaan guna mendukung pelaksanaan MusrenbangDes yang lebih partisipatif dan efektif.

Kata Kunci: Koordinasi, Pemerintah Desa, BPD, MusrenbangDes.

.

ABSTRACT

This study aims to analyze the coordination between the Village Government and the Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa (BPD)) in the implementation of the Village Development Planning Deliberation (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes)) in Batu Mas Village at Nanga Tayap District in Ketapang Regency. This study was motivated by the suboptimal coordination between the Village Government and the BPD in the village development planning process. The analysis applies Handayaningrat's coordination theory, which consists of the following indicators: communication, awareness of the importance of coordination, participant competence, agreement, commitment, coordination incentives, and planning continuity. This study employs a descriptive method with a qualitative approach. The research informants consisted of the Village Secretary, BPD, and Neighbourhood Association (Rukun Tetangga (RT)) Chairpersons, who were selected purposively. The findings indicate that coordination between the Village Government and the BPD in the implementation of MusrenbangDes has been conducted but remains suboptimal, particularly in the aspects of communication, awareness of the importance of coordination, participant competence, and planning continuity. The main obstacles were found in communication, which remained formal and situational; awareness of the importance of coordination, which has not yet been fully translated into action; participant competence, which still needed to be improved; and planning continuity, which was constrained by limited funding and differing perceptions regarding development priorities. Therefore, it is suggested that the Village Government and the BPD strengthen regular and continuous communication, enhance coordination beyond formal MusrenbangDes forums, and improve the capacity of village officials through training and capacity-building programs to support more effective, participatory, and sustainable village development planning.

Keywords: *Coordination, Village Government, Village Consultative Body, Village Development Planning Deliberation*.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul *"Koordinasi Antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Batu Mas Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang."* Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD dalam pelaksanaan MusrenbangDes sebagai forum perencanaan pembangunan desa yang partisipatif. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan berupa komunikasi yang belum optimal, keterlibatan BPD yang belum maksimal, serta perbedaan persepsi mengenai prioritas pembangunan desa.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD dalam pelaksanaan MusrenbangDes di Desa Batu Mas. Analisis penelitian menggunakan teori koordinasi Handayaningrat (1989) yang terdiri dari indikator komunikasi, kesadaran akan pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen, insentif koordinasi, dan kontinuitas perencanaan. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian terdiri dari Sekretaris Desa, Ketua BPD, Anggota BPD, dan Ketua RT yang dipilih secara purposive. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa koordinasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan MusrenbangDes telah berlangsung pada setiap tahapan perencanaan pembangunan desa, mulai dari penyampaian informasi, pelaksanaan musyawarah, hingga tindak lanjut hasil

perencanaan. Meskipun demikian, koordinasi yang dilakukan masih menghadapi berbagai kendala. Komunikasi antarlembaga belum dilakukan secara intensif di luar forum formal, kesadaran untuk membangun koordinasi secara berkelanjutan masih terbatas, serta kualitas partisipasi belum didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur dan anggota BPD. Selain itu, penelitian juga menemukan adanya perbedaan pandangan antara Pemerintah Desa dan BPD dalam menentukan skala prioritas pembangunan sehingga belum seluruh aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan desa.

Kesimpulan penelitian ini adalah koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD belum mampu membangun sinergi yang optimal dalam pelaksanaan MusrenbangDes. Hubungan kerja kedua lembaga telah berjalan sesuai ketentuan, namun pelaksanaannya masih berorientasi pada pemenuhan prosedur dibandingkan pada upaya menyelaraskan persepsi dan menghasilkan keputusan pembangunan secara bersama. Akibatnya, proses perencanaan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat karena masih terdapat perbedaan dalam menentukan prioritas pembangunan. Disarankan bagi Pemerintah Desa dan BPD perlu membangun pola koordinasi yang lebih berkelanjutan melalui komunikasi yang dilakukan secara berkala sejak tahap pra-MusrenbangDes hingga pasca-MusrenbangDes. Keterbukaan informasi mengenai kondisi keuangan desa dan penentuan skala prioritas pembangunan juga perlu ditingkatkan agar tercipta kesamaan persepsi antarpihak. Selain itu, kapasitas aparatur desa dan anggota BPD perlu diperkuat melalui pelatihan, disertai optimalisasi peran BPD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sehingga pelaksanaan MusrenbangDes dapat

menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Margareta Amadia Liana

Nomor Mahasiswa : E1032221027

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepnajang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 2 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



(Margareta Amadia Liana)

NIM.E1032221027

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. terjadilah padaku,menurut kehendak-Mu"
(Lukas 1:38)

SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK:

1. Tuhan Yesus Kristus, terimakasih ya Tuhan atas segala penyertaan dan berkat-Mu hamba dapat menyelesaikan masa studi ini. Dari awal perjalanan kuliah hingga titik ini dimana hamba menyelesaikan tugas akhir, walau tidak selalu mudah indah tapi penyertaan dan berkat-Mu tidak pernah putus dalam hidup hamba. Hingga akhirnya hamba bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini semua atas penyertaan-Mu.

2. Kedua orang tua peneliti bapak Hyginus Dhadu dan ibu Maria Goretti Warti Lining, terimakasih selalu memberi dukungan dalam bentuk materi dan doa yang tanpa henti. Terimakasih karena kalian selalu memberi dukungan walau peneliti sedang berada dititik terrendah, terimakasih atas hujanan doa yang tanpa henti mengiringi langkah peneliti dari awal peneliti melangkah untuk kuliah hingga sekarang.

3. Kepada saudari peneliti satu-satunya Elisabeth Noveliana S.Pd, terimakasih atas segala dukungan dan bimbingan kepada peneliti sehingga peneliti tidak takut dalam melangkah dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Sahabat-sahabat dari kecil sekaligus keluarga yang sama sama berjuang menyelesaikan masa perkuliahan, Apriliana Fransisca Florida dan Maria Freska

Ine Dedu. Terimakasih karena saling memberi support dan selalu menemani dan mendengarkan keluh kesah peneliti selama ini, terimakasih karena selalu menjadi sahabat terbaik dari kecil hingga sekarang. Sahabat peneliti selama masa perkuliahan dari semester awal hingga sekarang, Sesa Wahdini. Terimakasih karena selalu memberikan support, terimakasih selalu membantu dan mau melangkah bersama untuk menyelesaikan perkuliahan ini, sehingga peneliti tidak merasa sendirian dan tertinggal, peneliti sangat bersyukur memiliki sahabat seperti anda dihidup peneliti

5. Terima kasih kepada seseorang dengan NIM **C1012241013** yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan perhatian selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena telah hadir dan menemani salah satu perjalanan penting dalam hidup peneliti. Segala bentuk bantuan dan kebaikan yang diberikan akan selalu menjadi bagian yang berharga dari cerita di balik selesainya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus. Karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul *"Koordinasi Antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Di Desa Batu Mas, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang"* dengan baik dan tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, dan Terkhusus peneliti juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si, selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan dalam studi peneliti.
2. Dr. Sri Maryuni, M.Si dan Rasidar, SE, M.Si selaku Dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Ir. Hj. Ida Rochmawati, M.Si selaku dosen Penguji utama yang telah bersedia memberikan saran dan masukan agar penulisan skripsi ini memiliki penulisan dan kualitas yang baik. Serta selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

4. Drs. Sugino, M.Si selaku dosen Penguji pendamping yang memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Haunan Fachry Rohilie, S.I.P, M.A selaku Pembimbing Akademik yang telah bersedia memberikan saran dan masukan agar penulisan Skripsi ini memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
6. Bima Sujendra, S.I.P, M.Si selaku Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Staf Jurusan Ilmu Administrasi, Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua BPD Batu Mas Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang beserta staff dan jajarannya yang telah memberikan data dan informasi kepada peneliti dalam melakukan penulisan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan Skripsi ini ke tahap selanjutnya.

Pontianak, 2 Juli 2026
Peneliti

Margareta Amadia Liana
NIM.E1032221027

DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAK ..... **i**

ABSTRACT ..... **ii**

RINGKASAN SKRIPSI ..... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vi**

MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xiv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Identifikasi Masalah 8
1.3 Fokus Penelitian 8
1.4 Rumusan Masalah 9
1.5 Tujuan Penelitian 9
1.6 Manfaat Penelitian 9
1.6.1 Manfaat Teoritis 9
1.6.2 Manfaat Praktis 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

2.1. Landasan Teori 12
2.1.1 Perencanaan 12
2.1.1.2 Perencanaan Pembangunan 16
2.1.2 Koordinasi 19
2.1.3 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) 25
2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan 28
2.3 Alur Pikir Penelitian 31
2.4 Pertanyaan Penelitian 33

BAB III METODE PENELITIAN 34

3.1 Jenis Penelitian 34
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 36
3.3 Lokasi dan Waktu penelitian 37
3.3.1 Lokasi Penelitian 37
3.3.2 Waktu Penelitian 38
3.4 Subyek Dan Obyek Penelitian. 40
3.4.1 Subyek Penelitian 41
3.4.2 Objek Penelitian 42
3.5 Teknik Pengumpulan Data 43
3.6 Alat Pengumpulan Data 45
3.7 Analisis Data 47
3.7.1 Keabsahan Data 47
3.7.2 Teknik Analisis Data 48

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH 50

4.1 Gambaran Umum Desa Batu Mas 50
4.11 Visi dan Misi Desa Batu Mas 50
4.2 Kondisi Geografis 51
4.3 Kondisi Demografi 55
4.3 Kondisi Sosial Ekonomi 57
4.4 Organisasi Desa Pemerintah Desa Batu Mas 61

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 67

5.1.Pelaksanaan Koordinasi Dalam Musrenbangdes 67
5.1.1 Komunikasi Dalam Pelaksanaan MusrenbangDes 68

5.1.2 Kesadaran Pentingnya Koordinasi Dalam Pelaksanaan MusrenbangDes 71
5.1.3 Kompetensi Partisipasi Dalam Pelaksanaan MusrenbangDes 74
5.1.4 Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi Dalam Pelaksanaan MusrenbangDes 78
5.1.5 Kontinuitas Perencanaan Dalam Pelaksanaan MusrenbangDes 85
BAB VI PENUTUP 90
6.1 Kesimpulan 90
6.2 Saran..... 94
6.3 Keterbatasan Penelitian..... 95
DAFTAR PUSTAKA..... 97

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian..... 39
Tabel 4. 1 Batas Desa Batu Mas..... 53
Tabel 4. 2 Jarak ke Ibukota Kecamatan/Ibukota Kabupaten/Ibukota Provinsi 54
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Tahun 2025 56
Tabel 4. 4 Distribusi Penduduk Usia Tahun 2025..... 56
Tabel 4. 5 Distribusi Penduduk Mata Pencaharian Tahun 2025 58
Tabel 4. 6 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Batu Mas 2025 59

DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 1. 1 Berita Acara Musrenbang Desa Batu Mas tahun 2025 6
Gambar 2. 1 Bagan Alur Pikir..... 32
Gambar 4. 1 Peta Desa Batu Mas..... 52

DAFTAR LAMPIRAN

halaman

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian 100
Lampiran 2 Pedoman Observasi 106
Lampiran 3 Hasil Dokumentasi 108
Lampiran 4 Dokumentasi Pelaksanaan Musrenbang Desa Batu Mas 2025..... 109
Lampiran 5 Biodata Peneliti 110
Lampiran 6 Surat Tugas Penelitian 112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan desa diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat 1 bahwa "Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan parasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan". Kemudian pada ayat 2 menyatakan bahwa "Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan". Selanjutnya Perencanaan Pembangunan Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa yang dimaksud dengan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan di Indonesia mengalami perubahan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)**.** Perencanaan pembangunan tidak lagi dipahami sekadar sebagai daftar kebutuhan atau usulan kegiatan, tetapi sebagai rencana kerja yang disusun secara sistematis, terukur, dan partisipatif**.** Perubahan ini juga berlaku hingga ke tingkat desa, di mana perencanaan

pembangunan desa diharapkan mampu mengintegrasikan proses *bottom-up* (aspirasi masyarakat) dan

top-down (kebijakan pemerintah).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai empat tugas pokok, yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan kemasyarakatan, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Keempat tugas tersebut menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tiga fungsi utama, yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa BPD berperan sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang menjadi mitra

pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pelaksanaan MusrenbangDes tidak dapat dilepaskan dari peran dan koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah Desa berperan sebagai pelaksana dan pengelola pembangunan desa, sedangkan BPD berperan sebagai mitra sekaligus representasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan melakukan pengawasan.

Koordinasi antar aktor desa menjadi unsur yang sangat penting, khususnya koordinasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**.** Koordinasi diperlukan agar setiap tahapan perencanaan, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes), dapat berjalan selaras dan tidak hanya bersifat formalitas administratif. Melalui koordinasi yang baik, peran masing-masing lembaga dapat saling melengkapi dalam merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diartikan dalam Kepmendagri No.114 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 7 menyebutkan bahwa “Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pengertian tersebut, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) merupakan forum partisipatif yang mempertemukan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

dan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Melalui forum ini, berbagai aspirasi, kebutuhan, dan usulan pembangunan dibahas serta disepakati bersama untuk menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, keberhasilan MusrenbangDes sangat bergantung pada keterlibatan aktif seluruh pihak serta koordinasi yang baik antara Pemerintah Desa dan BPD guna menghasilkan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung tercapainya pembangunan desa yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Desa Batu Mas merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah mencapai 10.200 hektar**.** Secara geografis, Desa Batu Mas terletak di daerah yang memiliki kondisi berbukit dan sebagian dataran tinggi**,** dengan ketinggian rata-rata sekitar 92 meter di atas permukaan laut**.** Wilayah ini berbatasan dengan Desa Cegolak di sebelah utara, Desa Pebihingan di sebelah selatan, Desa Serengkah di sebelah timur, dan Desa Siantau Raya di sebelah barat dan terdiri dari empat dusun yaitu dusun Kampung Baru, Dusun Batu Monang, Dusun Sungai Kerta dan Dusun Berani. Berdasarkan data profil desa tahun 2025, jumlah penduduk Desa Batu Mas mencapai 1.327 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Batu Mas bekerja di sektor pertanian dan perkebunan**,** khususnya perkebunan kelapa sawit yang menjadi komoditas utama masyarakat. Desa Batu Mas juga memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, di antaranya lahan perkebunan seluas lebih dari 600 hektar, lahan hutan sekitar 38 hektar**,** serta sumber air yang berasal dari sungai dan sumur pompa. Namun, tantangan yang

dihadapi desa ini antara lain kondisi infrastruktur yang masih perlu pengembangan, serta keterbatasan sarana transportasi dan fasilitas publik yang belum sepenuhnya merata. Dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang dimiliki, Desa Batu Mas memiliki peluang besar untuk berkembang melalui perencanaan pembangunan yang partisipatif. Oleh karena itu, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menjadi sangat penting sebagai wadah koordinasi antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun program prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) sebagai forum utama perencanaan partisipatif merupakan proses penting dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan desa. Proses ini diselenggarakan melalui mekanisme perencanaan yang melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat. Hasil dari proses tersebut kemudian dirumuskan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan desa dalam satu tahun anggaran.

RKP Desa disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan seharusnya mencerminkan proses perencanaan yang terkoordinasi antar lembaga desa. Dalam RKP Desa Batu Mas, penyusunan perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui tahapan formal yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta hasil MusrenbangDes. Secara normatif, mekanisme ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan desa

telah dirancang untuk melibatkan Pemerintah Desa dan BPD sebagai mitra dalam proses perencanaan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) merupakan forum yang mempertemukan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat dalam membahas serta menyepakati prioritas pembangunan desa. Melalui forum ini, berbagai usulan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan dihimpun sebagai dasar penyusunan rencana pembangunan desa. Oleh karena itu, keterlibatan setiap unsur yang hadir dalam MusrenbangDes menjadi penting untuk memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan desa berjalan secara partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Gambaran mengenai keterlibatan para pihak dalam pelaksanaan MusrenbangDes di Desa Batu Mas dapat dilihat melalui Berita Acara MusrenbangDes berikut.

Gambar 1. 1

Berita Acara Musrenbang Desa Batu Mas tahun 2025



Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Batu Mas Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2054, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, Mes 18 Oktober 2024
Jam : 09.00 wib - Selesai
Tempat : Kantor Desa Batu Mas

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi
1. Penyampaian Rancangan RKP Desa 2025 dan DU-RKP Desa 2026 hasil Musrenbang Desa oleh Kepala Desa;
2. Evaluasi capaian pelaksanaan Pembangunan 2024 oleh Kepala Desa;
3. Penyampaian Persetujuan atas Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa 2025 dan DU-RKP Desa 2026 oleh Ketua BPD

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Musyawarah : MARKUS SUMITRO dari Ketua BPD
Notulen : ANTONIA MAHARNI ANIK dari Sekretaris BPD
Narasumber : 1. MARKUS dari PLD
2. KUKONG dari Sekretaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

1. Menyetujui dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa 2025 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun anggaran 2025
2. Menyetujui dan menyepakati DU-RKP Desa 2026 untuk disampaikan dalam musrenbang kecamatan
3. Tersampaikannya informasi hasil capaian pembangunan 2024
   a. Bidang Pembangunan desa dimana usulan tersebut masuk kedalam kategori prioritas anggaran tahun 2025.
   b. Adapun usulan yang masuk akan di ferivikasi terlebih dahulu.
   c. Usulan – usulan tersebut meliputi :
      - Pembangunan Jalan Usaha Tani
      - Pembangunan / Fasilitasi Sumber Air Bersih
      - Penyertaan Modal Bumdesma
      - Pelatihan Kapasitas Aparatur Desa
      - Penyediaan dan Sosialisasi Penggunaan Teknologi Informasi Digital Desa
      - Pembinaan TP PKK dan Pembentukan Dasa Wisma

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu Mas, 18 Oktober 2024

PJ KEPALA DESA BATU MAS
JAMALUDIN

KETUA BPD DESA BATU MAS
MARKUS SUMITRO

Sumber: RKPD Desa Batu Mas 2025

Berdasarkan berita acara MusrenbangDes, tidak ditemukan usulan atau aspirasi yang disampaikan oleh BPD dalam forum musyawarah. Sementara itu, usulan yang tercatat berasal dari unsur PKK, tokoh adat, dan Karang Taruna. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran BPD dalam penyampaian aspirasi masyarakat tidak terlihat secara langsung dalam forum MusrenbangDes. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana BPD menjalankan fungsi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat serta bagaimana koordinasi yang terjalin antara BPD dan Pemerintah Desa dalam proses perencanaan pembangunan desa. Fenomena tersebut menjadi penting untuk dikaji karena BPD merupakan salah satu unsur yang memiliki peran strategis dalam proses perencanaan pembangunan desa. Tidak terlihatnya penyampaian aspirasi oleh BPD dalam forum MusrenbangDes menimbulkan indikasi bahwa terdapat aspek koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD yang perlu ditelaah lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada koordinasi Pemerintah

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDes) di Desa Batu Mas Kecamatan Nanga Tayap Kabupaten Ketapang.

1.2 Identifikasi Masalah

Belum maksimalnya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Batu Mas dipengaruhi oleh beberapa indikator seperti:

1. Komunikasi antara Pemerintah Desa dan BPD dalam pelaksanaan MusrenbangDes kurang berjalan optimal.
2. Kesadaran para pihak akan pentingnya koordinasi dalam pelaksanaan MusrenbangDes masih rendah.
3. Adanya keterbatasaan kompetensi partisipasi pihak pihak yang terlibat dalam MusrenbangDes
4. Kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi antara Pemerintah Desa dan BPD belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan MusrenbangDes
5. Belum terjaganya kesinambungan perencanaan dalam pelaksanaan MusrenbangDes

1.3 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah pada pelaksanaan koordinasi internal antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa melalui MusrenbangDes di Desa Batu Mas.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dijelaskan diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah “Bagaimana Pemerintah Desa dan BPD menjalankan fungsi koordinasi internal dalam pelaksanaan MusrenbangDes di Desa Batu Mas?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan koordinasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa melalui MusrenbangDes di Desa Batu Mas.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan kebijakan pembangunan daerah.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Pemerintahan.

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya terkait teori koordinasi antar lembaga pemerintahan di tingkat desa.

2. Hasil penelitian ini memperkaya literatur mengenai praktik Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan dinamika hubungan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji tema serupa, baik dalam konteks koordinasi pemerintahan desa maupun peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Batu Mas. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Pemerintah Desa Batu Mas, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pola koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga pelaksanaan Musrenbangdes dapat lebih efektif dan menyerap aspirasi seluruh masyarakat.
2. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Batu Mas**,** penelitian ini memberi gambaran tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam mengawal aspirasi masyarakat serta menjaga kualitas dokumen perencanaan pembangunan desa.

3. Bagi masyarakat Desa Batu Mas, penelitian ini dapat memberikan pemahaman akan pentingnya partisipasi dalam Musrenbangdes serta mendorong pemerataan pembangunan antar dusun.
4. Bagi pemerintah daerah (Kabupaten Ketapang), hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam melakukan pembinaan terhadap desa-desa, khususnya dalam hal meningkatkan kapasitas koordinasi antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).